

Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum

Frisiska Oktarina^{1*}, Yulia Saftiana², Azwardi³
Universitas Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia
frisiskasyakira@gmail.com^{1*}, yuliasaftiana@fe.unsri.ac.id², azwardi_unsri@yahoo.com³

*Corresponding Author

Diajukan : 2 Juni 2023

Disetujui : 6 Juni 2023

Dipublikasikan : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of transparency, oversight, accountability and redesign of the budgeting system either partially or simultaneously on the performance of Public Service Agencies. The population was taken from PPSPM, PPK, Planning/Budget Coordinator, Finance, Academic Section along with Staff and SPI so that the population was 204 people. The sampling technique used is saturated sampling so that the entire population of 204 people is taken as a sample. The analysis technique used is multiple regression with the help of the SPSS application by testing the hypothesis using the t test and F test. The partial results show that the transparency variable has no significant effect on financial performance with a significance value of 0.552. The monitoring variable has a significant effect on financial performance with a significance value of 0.008. The accountability variable has no significant effect on financial performance with a significance value of 0.738. The redesign variable of the budgeting system has a significant effect on financial performance with a significance value of 0.024. Simultaneously the variables of transparency, supervision, accountability and redesign of the budgeting system simultaneously have a significant effect on financial performance with a significance value of 0.000. The conclusion shows that partially only the monitoring and budgeting system redesign variables have an effect on financial performance while simultaneously all independent variables including transparency, supervision, accountability and budgeting system redesign simultaneously have a significant effect on financial performance.

Keywords: *Accountability, Budgeting System Redesign, Financial Performance, Oversight, Transparency*

PENDAHULUAN

Prinsip utama dari hubungan keagenan yaitu adanya pemisahan diantara para pemilik modal dan para pengelola perusahaan, namun para pengelola harus diberikan pengawasan dan pengendalian guna mempersempit ketidaksesuaian informasi serta memberikan kepastian bahwa para pengelola perusahaan menjalankan kewenangannya dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan (Etienne, 2011). Berbagai penelitian yang berhubungan dengan kinerja diantaranya Hermanto et al., (2021), dan Putri, (2018) bahwa kinerja dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum, yang kemudian disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sehubungan dengan pengukuran kinerjanya Universitas Sriwijaya menggunakan pengukuran kinerja keuangan dan kinerja layanan (Pengukuran tingkat BLU *Maturity Ratin*. Adapun capaian BLU *Maturity Rating* dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 1 Capaian *Maturity Rating* Universitas Sriwijaya Tahun 2020 dan 2021

No	Aspek	Skor Maturity		Bobot	Bobot * Skor Maturity	
		2021	2020		2021	2020
1	KEUANGAN	2.31	2.50	20%	0.46	0.50
2	LAYANAN					
	1. Pelayanan	4.67	4.67	25%	1.17	1.17
	2. Kapabilitas Internal	2.25	5.00	20%	0.45	1.00
	3. Tata Kelola dan Kepemimpinan	2.00	5.00	20%	0.40	1.00
	4. Inovasi	1.25	5.00	10%	0.12	0.50
	5. Lingkungan	2.00	5.00	5%	0.10	0.25
Total Tingkat BLU Maturity				100%	2.70	4.42

Sumber : <https://bios.kemenkeu.go.id/home> 2022

Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2021, angka BLU maturity Rating mengalami penurunan dari 4.42 menjadi 2.70. Menurut level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) nilai 2,70 artinya telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan. Untuk menuju ke score tertinggi yaitu 5.0 Unsri masih memiliki kendala yaitu strategi pencapaian kinerja masih belum relevan dan terintegrasi dan struktur dan proses pengendalian masih hanya sebatas pemenuhan kewajiban sehingga belum efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Tabel 1 juga menunjukkan pada tahun 2021 pada aspek keuangan nilai total value for moneynya 2,31 meningkat 0.01 skor dari tahun 2020 sebesar 2.30 yang artinya untuk tahun 2021 Unsri masih berada pada level *Define* yang artinya kinerja diukur dan tidak memenuhi target yang relevan dan/atau menunjukkan tren peningkatan (Dit. PPK BLU, 2020).

Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya transparansi, agen yang berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal untuk meminimalisir *information asymmetry* dengan meningkatkan transparansi sehingga memberikan gambaran kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja layanan yang sesungguhnya kepada prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sehubungan dengan penilaian peringkat Universitas terbaik di Indonesia tahun 2021 bergantung pada *Impact Rank*, *Openness* dan *Excellence Rank*. Salah satu kategori *Openness* didominasi oleh UGM, IPB dan Unair yang ditunjukkan dengan banyaknya file yang mudah diakses dengan domain yang terhubung dengan laman Universitas. Sedangkan Universitas Sriwijaya belum termasuk kedalam kategori ini, dimana hal ini terkait dengan PPID Unsri (Berita Terkini, 2021). Penelitian Purnomo (2018), Sihombing (2020), Urdaneta, (2021), dan Oino (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan Abdullah (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan aturan (*code*). *Agent* merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinannya. *Principal (accountee)* merupakan pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada agent dan memberi sanksi jika tindakan atau jawaban agen tidak memuaskan. Aturan (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan kinerja yang berisi harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada agen. Hermanto et al., (2021), Batubara & Risna, (2020), Boloupremo & Ogege (2021) dalam penelitiannya pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun tidak sejalan dengan Widajatun (2020) penelitiannya menunjukkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah paket Undang-Undang Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, berisi tiga kaidah baru dalam manajemen keuangan negara, salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas. Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain

sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya. Dua pihak yang ada dalam kerangka pikir akuntabilitas biasanya dideskripsikan sebagai *principal* dan *agent*. *Principal* diartikan sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban dan *agent* dimaksudkan sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993). Penelitian Putri (2018), Karim (2019), Nasution (2018) dan Han (2020) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan Kepramareni & Pradnyawati (2021) menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sehubungan dengan redesain sistem penganggaran kendala di tingkat satker adalah yaitu masih belum terintegrasinya sistem perencanaan (Sirena) dengan sistem keuangan (Simkeu) serta sistem capaian output dan kinerja (Sipecokin) serta Sitari (sistem infomarsi inventarisasi BMN UNSRI). Pada intinya, data anggaran yang tersedia pada aplikasi sakti berbeda dengan data anggaran pada sirena dan simkeu (untuk pelaksanaan anggaran). penyesuaian dilakukan secara manual sehingga sering terjadinya pagu minus dan salah pembebanan belanja terhadap anggaran yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018) dan Nurcahyono et al., (2019) menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Namun berbeda dengan Mardalaila et al., (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian di atas namun yang membedakannya peneliti menambahkan variabel redesain sistem penganggaran. Hal ini dikarenakan konsep redesain sistem penganggaran terbilang masih baru dalam mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien serta berbasis kinerja RSP, oleh sebab itulah maka penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Boloupremo & Ogege (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengawasan terhadap Stabilitas Keuangan dan Kinerja Perusahaan Asuransi di Nigeria. Data time series dari tahun 2011 - 2017 bersumber dari kuesioner penelitian terstruktur, laporan keuangan, laporan industri, dan Nigerian Insurers Association (NIA) Digests. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan matriks korelasi dan analisis regresi (teknik OLS). Hasil dari data yang dianalisis menunjukkan bahwa pengawasan asuransi secara signifikan mempengaruhi kinerja laba.

Anggraini et al., (2021) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Penganggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan usaha milik desa di kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 21 Badan Usaha Milik Desa yang diperoleh dari metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling, dan diperoleh 44 responden. Data kuesioner diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. Transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money.

Agbenyo et al., (2018) melakukan penelitian mengenai “*Budgeting and Its Effect on the Financial Performance of Listed Manufacturing Firms: Evidence from Manufacturing Firms Listed on Ghana Stock Exchange*”. Teknik sampling yang digunakan adalah crosssectional dan convenience sehingga diperoleh 51 orang responden. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi untuk melihat hubungan antara penganggaran dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara penganggaran dan kinerja keuangan.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang memberikan jaminan akses untuk setiap orang agar mudah memperoleh informasi tentang pengelolaan organisasi (Mardiasmo, 2016). PP Nomor 71

tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran. Dimensi transparansi terbagi menjadi 2 yaitu Informativeness (informatif) dan Disclosure (pengungkapan) (Mardiasmo, 2016).

Pengawasan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimensi pengawasan meliputi penetapan standar, pengukuran, membandingkan dan melakukan tindakan (Satriadi, 2016).

Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai beberapa pengertian, secara terminologi seringkali dipakai pada beberapa konsep meliputi “*answerability, responsibility, dan terminology*” yang berhubungan dengan “keinginan prinsipal terhadap agen” (*the expectation of account-giving*). Oleh sebab itu maka akuntabilitas merangkum keinginan atau dugaan perilaku keterkaitan antara prinsipal dan agen. Dimensi accountability terdiri dari “akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial” (Mardiasmo, 2016).

Redesain Sistem Penganggaran

Perancangan kembali sistem penganggaran adalah mendesain ulang kegiatan penganggaran dalam upaya perbaikan atas kualitas penganggaran (Perencanaan, 2020). Menurut PP No. 17 Tahun 2017 mengenai penyalarsan kegiatan penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional yang mengamanahkan pentingnya meningkatkan keselarasan pembangunan nasional dengan pendekatan “Tematik, Holistik, Integratif” dengan memberikan perhatian pada bagian kedaerahan atau Spasial (THIS) guna perwujudan pelaksanaan “*money follow program*”.

Hipotesis

Berdasarkan uraian teori yang didukung oleh penelitian terdahulu, maka peneliti menyusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja BLU

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agensi diantaranya bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal untuk meminimalisir *information asymmetry* dengan meningkatkan transparansi sehingga memberikan gambaran kinerja baik kinerja keuangan maupun kinerja layanan yang sesungguhnya kepada prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Transparansi merupakan kebebasan pemerintah dalam mengakses kegiatan ekonomi dan politik untuk pengambilan keputusan, dan akuntabilitas atas integritas keuangan, kepatuhan, mengungkapkan semua aturan undang-undang yang berlaku. Transparansi adalah prinsip penyelenggaraan yang bersifat terbuka yang membantu dan memfasilitasi masyarakat umum untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang diperlukan tanpa batasan terkait dengan manajemen keuangan daerah. Transparansi akan memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan kebebasan dan akses untuk informasi mengenai pengelolaan pemerintahan, termasuk undang-undang, kebijakan, perencanaan, pembuatan, implementasi, dan output dari implementasi. Transparansi berarti juga keterbukaan di dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan manajemen sumber daya publik untuk pihak yang berkepentingan. Dalam menghadapi masalah keagenan, transparansi informasi dapat mengurangi konflik keagenan antara agen dan prinsipal (Coryanata, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2018), Sihombing (2020), Urdaneta, (2021), dan Oino (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja BLU

Agency costs mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk "*bonding expenditures*" yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagi manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan aturan (*code*). *Agent* merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinannya. *Principal (accountee)* merupakan pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada agent dan memberi sanksi jika tindakan atau jawaban agen tidak memuaskan. Aturan (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan kinerja yang berisi harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada agen.

Hermanto et al., (2021), Batubara & Risna, (2020), Boloupremo & Ogege (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja BLU

Hubungan antara agen dan prinsipal menurut Jensen & Meckling, (1976) merupakan sebuah hubungan kontrak yang dilakukan antara satu orang atau lebih terhadap pihak lain (*agent*) yang melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka (*principal*) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada *agent*. Tanggung jawab para agen adalah untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan yang sudah dipercayakan kepada mereka dari para *principal* berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas kinerja yang dilakukan agen terhadap prinsipal.

Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya. Dua pihak yang ada dalam kerangka pikir akuntabilitas biasanya dideskripsikan sebagai *principal* dan *agent*. *Principal* diartikan sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban dan *agent* dimaksudkan sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Karim (2019), Nasution (2018) dan Han (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

Pengaruh Redesain Sistem Penganggaran Terhadap Kinerja BLU

Moe (1984) menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan juga oleh Gilardi (2001) dan Strom (2000) yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yakni pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada

pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi.

Perancangan kembali system penganggaran ini telah menstrukturisasi program terdahulu sehingga program lebih praktis dan diharapkan mampu membuat system kerjasama yang lebih baik, lebih cepat serta terhubung antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Perancangan kembali sistem penganggaran alur dan system penganggaran menjadi lebih praktis, efisien, efektif serta ekonomis sehingga diharapkan mampu mendorong seluruh sektor menjadi lebih baik hingga menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang tinggi (Mahmudi, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018) dan Nurcahyono et al., (2019) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Redesain sistem penganggaran berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

Pengaruh Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, dan Redesain Sistem Penganggaran Terhadap Kinerja BLU

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agensi diantaranya *bonding cost* yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal untuk meminimalisir *information asymmetry* dengan meningkatkan transparansi sehingga memberikan gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnya kepada prinsipal. Biaya agensi lainnya *monitoring cost* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap perilaku agen untuk membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen. (Jensen & Meckling, 1976).

Tanggung jawab para agen adalah untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan yang sudah dipercayakan kepada mereka dari para *principal* berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas kinerja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Gray & Jenkins, 1993). Selain itu Moe (1984), menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto et al., (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan redesign sistem penganggaran berpengaruh terhadap kinerja Badan Layanan Umum

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi diambil dari Bagian PPSPM, PPK, , Bagian Keuangan, Akademik beserta Staff, Koordinator dan Subkoordinator pada kantor pusat administrasi dan fakultas dan SPI sehingga populasi sejumlah 204 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh sehingga semua populasi sebanyak 204 pegawai tersebut digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan datanya menggunakan kuisisioner, dimana kuisisioner yang dipergunakan berupa kuisisioner langsung yang diserahkan dengan responden dan bersifat tertutup yaitu peneliti sudah menyediakan jawabannya mengenai variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesign sistem penganggaran serta kinerja dengan cara membagikan ke pegawai pengelola Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2013).

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan meliputi pegamatan, pemahaman, dan penilaian setiap melaksanakan aktivitas tertentu hingga mampu mencegah atau memperbaiki setiap kesalahan atau penyimpangan yang akan terjadi (Mardiasmo, 2018).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

4. Redesain Sistem Penganggaran

Perancangan ulang system penganggaran adalah mendesain ulang system penganggaran dalam rangka proses perbaikan atas kualitas anggaran. (Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

5. Kinerja

Kinerja disini dinilai menggunakan Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur dan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang dibebankan kepada suatu organisasi sudah berhasil dicapai. Unsur-unsur yang terdapat dalam KPI terdiri atas tujuan strategis, indikator kunci yang relevan dengan sasaran strategis tersebut, sasaran yang menjadi tolak ukur dan kerangka waktu atau periode berlakunya KPI tersebut (Soemohadiwidjojo, 2015).

Transparansi sebagai variabel X_1 , Pengawasan sebagai variabel X_2 , Akuntabilitas sebagai variabel X_3 dan Redesain Sistem Penganggaran sebagai variabel X_4 dan Kinerja sebagai variabel Y dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Transparansi (X_1)	Informativeness (Informatif)	a. Tepat waktu	Ordinal
		b. Memadai	
		c. Jelas	
		d. Akurat	
		e. Dapat diperbandingkan	
		f. Mudah diakses	
Pengawasan (X_2)	Disclosure (Pengungkapan)	a. Kondisi keuangan	Ordinal
		b. Susunan pengurus	
		c. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan	
Pengawasan (X_2)	Menetapkan Standar	a. Penetapan target atau hasil	Ordinal
		b. Penetapan batasan dalam melaksanakan kegiatan	
	Pengukuran (Measurement)	a. Proses yang kontinue	Ordinal
		b. Pengukuran mutu dan hasil	
Membandingkan (Compare)	Membandingkan (Compare)	a. Membandingkan antara hasil dan standar	Ordinal
		b. Penilaian kinerja dengan standar	

	Melakukan Tindakan (Action)	a. Keputusan mengambil tindakan koreksi b. Tindakan follow up	Ordinal
Akuntabilitas (X ₃)	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan b. Kejujuran dalam menjalankan kegiatan c. Penghindaran penyalahgunaan jabatan	Ordinal
	Akuntabilitas Manajerial	a. Pertanggungjawaban b. Pengelolaan sumberdaya secara efektif dan efisien	Ordinal
	Akuntabilitas Program	a. Memiliki program yang bermutu b. Program mendukung strategi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi c. Mempertanggungjawabkan program	Ordinal
	Akuntabilitas Kebijakan	a. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah ditetapkan b. Pertanggungjawaban atas dampak kebijakan	Ordinal
	Akuntabilitas Finansial	a. Pertanggungjawaban penggunaan dana b. Penyusunan laporan keuangan	Ordinal
Redesain Sistem Penganggaran (RSP)	Redesain Program	a. Program mencerminkan tugas dan fungsi b. Program memiliki sasaran yang memberikan cerminan hasil kinerja program yang ingin dicapai c. Indikator kinerja program sebagai alat ukur menilai capaian kinerja program d. Program dapat disinkronkan agar capaian kinerjanya dapat optimal e. Redesain program menjadikan proses anggaran, implementasi, pengawasan, evaluasi serta pelaporan menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan f. Program yang real menjadi target cerminan sasaran kinerja g. Penyampaian informasi kepada masyarakat lebih sederhana dan mudah dipahami h. Program bersifat pendukung i. Program didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional j. Program memiliki sasaran; hasil; indikator kinerja; aktivitas; tujuan dan indikator kinerja lebih spesifik sehingga memiliki perbedaan dengan program lainnya k. Dukungan manajemen l. Sasaran program untuk masing-masing unit m. Sasaran program mencerminkan hasil kerja program n. Indikator kinerja program o. Output program	Ordinal

	Redesain Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas menghasilkan keluaran b. Pemetaan kegiatan c. Kegiatan prioritas d. Kegiatan spesifik 	Ordinal	
	Redesain Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Output mengacu pada jenis intervensi Pemerintah b. Output memperhatikan kerangka regulasi c. Pengelompokan output d. Adanya standar output e. Output disusun berdasarkan keluaran sejenis f. Output berfokus pada isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit kerja g. Pertemuan trilateral meeting 	Ordinal	
	Kinerja (Y)	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional b. Realisasi Pendapatan BLU c. Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset d. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 	Ordinal
		Kinerja Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta b. Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional c. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>By Subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir d. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja e. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen f. Persentase Prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra g. Persentase mata kuliah yang menggunakan pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok 	Ordinal

berbasis proyek (*project-based learning*)
sebagai sebagian bobot evaluasi
h. Persentase Program Studi yang memiliki
akreditasi atau sertifikasi internasional
yang diakui pemerintah

Teknik Analisis Data

Mertode analisis menggunakan metode statistic parametrik dengan regresi linier berganda dengan persamaan garis sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

b_{1234} = Koefisien regresi

X_1 = Transparansi

X_2 = Pengawasan

X_3 = Akuntabilitas

X_4 = Redesain Sistem Penganggaran

Uji Instrumen Penelitian

Perhitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang semestinya diukur, atau tidak (Yaniawati, 2017). Pengujian validitas berguna untuk mengetahui derajat ketepatan instrumen dalam mengumpulkan data penelitian. Pengujian validitas dalam penelitian ini dihitung dengan ketentuan jika r hitung positif, serta r hitung $>$ r tabel, maka butir atau variabel tersebut dinyatakan valid (Sugiyono, 2018)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan instrumen. Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Kehandalan merupakan pendukung penting bagi validitas tetapi bukan syarat yang cukup untuk mendapatkan validitas, variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ dari 0,6 (Yaniawati, 2017).

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan beberapa uji asumsi klasik meliputi Ghozali (2016):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam pengujian apakah dalam model regresi nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan ataupun tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram hal ini tidak menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Jika $VIF > 10$ dan nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinieritas.

b. Jika $VIF < 10$ dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas memiliki arti bahwa terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Dasar analisis metode ini yaitu:

a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis t (Uji t)

Uji signifikansi t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria (Sugiyono, 2018):

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak artinya secara parsial variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima artinya secara parsial variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

2. Uji Hipotesis F

Uji hipotesis F menggambarkan apakah semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, adapun kriterinya meliputi (Sugiyono, 2018):

- Taraf signifikansi $\alpha = 0,05$
- H_0 akan ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel bebas (X) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
- H_a akan diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

HASIL

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil uji validitas variabel transparansi sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

No	Pernyataan	r hitung	R tabel	Keterangan
1	T1	0.732	0.1484	Valid
2	T2	0.695	0.1484	Valid
3	T3	0.719	0.1484	Valid
4	T4	0.754	0.1484	Valid
5	T5	0.620	0.1484	Valid
6	T6	0.441	0.1484	Valid
7	T7	0.685	0.1484	Valid
8	T8	0.658	0.1484	Valid
9	T9	0.738	0.1484	Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel transparansi lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel transparansi dinyatakan valid.

Hasil uji validitas variabel pengawasan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan

No	Pernyataan	r hitung	R tabel	Keterangan
1	P1	0.631	0.1484	Valid
2	P2	0.648	0.1484	Valid
3	P3	0.700	0.1484	Valid
4	P4	0.729	0.1484	Valid
5	P5	0.766	0.1484	Valid
6	P6	0.756	0.1484	Valid
7	P7	0.708	0.1484	Valid
8	P8	0.736	0.1484	Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel pengawasan lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel pengawasan dinyatakan valid.

Hasil uji validitas variabel akuntabilitas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

No	Pernyataan	r hitung	R tabel	Keterangan
1	A1	0.745	0.1484	Valid
2	A2	0.763	0.1484	Valid
3	A3	0.738	0.1484	Valid
4	A4	0.788	0.1484	Valid
5	A5	0.792	0.1484	Valid
6	A6	0.729	0.1484	Valid
7	A7	0.774	0.1484	Valid
8	A8	0.787	0.1484	Valid
9	A9	0.765	0.1484	Valid
10	A10	0.714	0.1484	Valid
11	A11	0.748	0.1484	Valid
12	A12	0.761	0.1484	Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel akuntabilitas lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel akuntabilitas dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel redesain sistem penganggaran sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Redesain Sistem Penganggaran

No	Pernyataan	r hitung	R tabel	Keterangan
1	R1	0.643	0.1484	Valid
2	R2	0.585	0.1484	Valid
3	R3	0.700	0.1484	Valid
4	R4	0.636	0.1484	Valid
5	R5	0.650	0.1484	Valid
6	R6	0.738	0.1484	Valid
7	R7	0.748	0.1484	Valid
8	R8	0.641	0.1484	Valid
9	R9	0.764	0.1484	Valid
10	R10	0.682	0.1484	Valid
11	R11	0.720	0.1484	Valid
12	R12	0.695	0.1484	Valid
13	R13	0.786	0.1484	Valid
14	R14	0.832	0.1484	Valid
15	R15	0.820	0.1484	Valid
16	R16	0.775	0.1484	Valid
17	R17	0.778	0.1484	Valid
18	R18	0.761	0.1484	Valid
19	R19	0.816	0.1484	Valid
20	R20	0.421	0.1484	Valid
21	R21	0.662	0.1484	Valid
22	R22	0.715	0.1484	Valid
23	R23	0.661	0.1484	Valid
24	R24	0.745	0.1484	Valid

25	R25	0.749	0.1484	Valid
26	R26	0.629	0.1484	Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel RSP lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel redesign sistem penganggaran dinyatakan valid.

Hasil uji validitas variabel kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja

No	Pernyataan	r hitung	R tabel	Keterangan
1	K1	0.706	0.1484	Valid
2	K2	0.682	0.1484	Valid
3	K3	0.728	0.1484	Valid
4	K4	0.779	0.1484	Valid
5	K5	0.585	0.1484	Valid
6	K6	0.631	0.1484	Valid
7	K7	0.761	0.1484	Valid
8	K8	0.647	0.1484	Valid
9	K9	0.720	0.1484	Valid
10	K10	0.813	0.1484	Valid
11	K11	0.771	0.1484	Valid
12	K12	0.528	0.1484	Valid

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

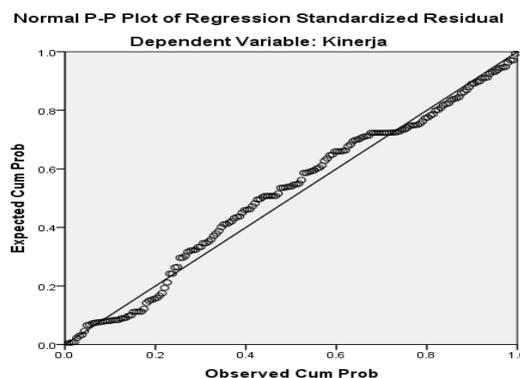
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa semua nilai r hitung untuk pernyataan variabel kinerja lebih besar dari nilai r tabel 0.1484. Hal ini berarti semua pernyataan dalam variabel akuntabilitas dinyatakan valid.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap regresi berganda dan uji hipotesis, maka data perlu dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat regresi. Adapun pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas yang masing-masing pengujiannya diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan gambar P Plot, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal P-P plot menunjukkan titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai VIF, adapun hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

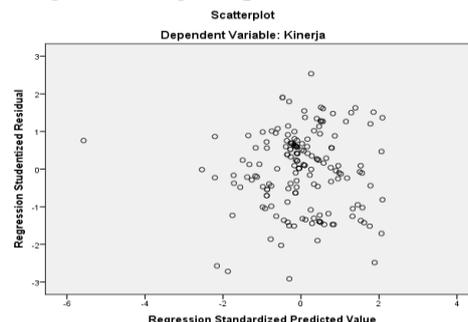
No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Transparansi (X ₁)	0.368	2.716	Tidak ada multikolinieritas
2.	Pengawasan (X ₂)	0.323	3.096	Tidak ada multikolinieritas
3.	Akuntabilitas (X ₃)	0.348	2.873	Tidak ada multikolinieritas
4.	Redesain Sistem Penganggaran (X ₄)	0.343	2.916	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai VIF semua variabel penelitian bernilai kurang dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *Tolerance* semua lebih besar dari 0,10 ($Tolerance > 0,10$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan diagram pencar (*scatter plot*), adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas dapat diketahui bahwa penyebaran titik-titik tidak membentuk pola (menyebar secara acak), hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.124	.329		3.415	.001
Transparansi	.069	.115	.064	.597	.552
Pengawasan	.313	.117	.303	2.669	.008
Akuntabilitas	-.037	.110	-.037	-.335	.738
RSP	.305	.134	.251	2.277	.024

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 9 maka dapat dibuat persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,064 X_1 + 0,303 X_2 - 0,037 X_3 + 0,251 X_4$$

Nilai koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,064 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel transparansi maka kinerja BLU akan meningkat sebesar 0,064 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan sebesar 0,303 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel pengawasan maka kinerja BLU juga akan meningkat sebesar 0,303 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar -0,037 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel akuntabilitas maka kinerja BLU akan menurun sebesar 0,037 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,251 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel redesain sistem penganggaran maka kinerja BLU juga akan meningkat sebesar 0,251 skor dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel terikat yaitu berdasarkan tabel 9 diketahui nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,552 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU. Kemudian diketahui nilai signifikansi variabel pengawasan sebesar 0,008 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU.

Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,738 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU. Selanjutnya diketahui nilai signifikansi variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,024 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel redesain sistem penganggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.189	4	3.797	17.408	.000 ^b
Residual	37.084	170	.218		
Total	52.273	174			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), RSP, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil koefisien korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 11. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.539 ^a	.291	.274

a. Predictors: (Constant), RSP, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Penelitian lapangan data di olah (2023)

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,539 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran terhadap kinerja BLU. Nilai adjusted R Square sebesar 0,274 yang

berarti bahwa variabel kinerja BLU dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran sebesar 27,4% sedangkan sisanya sebesar 72,6% di pengaruhi factor lain di luar penelitian ini seperti teknologi informasi.

PEMBAHASAN

Nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,552 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan BLU tidak akan berdampak terhadap peningkatan kinerja BLU. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan tuntutan masyarakat akan diterapkannya transparansi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, "Transparansi berarti wujud pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan tanpa ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Transparansi berperan sebagai kontrol atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Dalam menentukan arah keberhasilan proses pelaksanaan anggaran dibutuhkan kebijakan dalam proses penyusunan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga semakin transparan kebijakan yang dilaksanakan maka akses informasi terkait laporan pertanggungjawaban semakin terbuka dan dapat dengan mudah diketahui publik (P. Purnomo, 2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan tidak tergantung dari transparansi melainkan sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa mereka yang bekerja dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya sebagian besar telah memiliki pengalaman di atas 10 tahun. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yaitu transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdullah (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berbasis value for money.

Nilai signifikansi variabel pengawasan sebesar 0,008 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang berarti variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima yang menyatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja BLU. Pengawasan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan keuangan berkaitan erat dengan kinerja pemerintah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya (Halim & Iqbal, 2012).

Gray & Jenkins, (1993) menyatakan bahwa hubungan pengawasan dan kinerja terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan aturan (*code*). *Agent* merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinannya. *Principal (accountee)* merupakan pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada agent dan memberi sanksi jika tindakan atau jawaban agen tidak

memuaskan. Aturan (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan kinerja yang berisi harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada agen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermanto et al., (2021), Batubara & Risna, (2020), Boloupremo & Ogege (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,738 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 3 ditolak yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas tidak akan berdampak terhadap peningkatan kinerja BLU. Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya. Dua pihak yang ada dalam kerangka pikir akuntabilitas biasanya dideskripsikan sebagai *principal* dan *agent*. *Principal* diartikan sebagai pihak yang harus diberikan pertanggungjawaban dan *agent* dimaksudkan sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban sehubungan dengan kinerjanya (Gray & Jenkins, 1993).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BLU Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya telah melaksanakan pertanggungjawaban sejak dimulainya proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang konsisten sehingga tidak memungkinkan terjadinya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental organisasi tidak tergambar dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Namun kondisi ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan BLU, hal ini mencerminkan apa yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan belum dapat mencapai hasil yang maksimal sehingga tidak memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja keuangan BLU. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kepramareni & Pradnyawati (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Nilai signifikansi variabel redesain sistem penganggaran sebesar 0,024 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel redesain sistem penganggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja BLU. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 4 ditolak yang menyatakan bahwa variabel redesain sistem penganggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baik redesain sistem penganggaran yang dilakukan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja BLU. Redesain system penganggaran telah menstrukturisasi program terdahulu sehingga program lebih praktis dan diharapkan mampu membuat system kerjasama yang lebih baik, lebih cepat serta terhubung antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Perancangan kembali sistem penganggaran alur dan system penganggaran menjadi lebih praktis, efisien, efektif serta ekonomis sehingga diharapkan mampu mendorong seluruh sektor menjadi lebih baik hingga menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang tinggi (Mahmudi, 2015).

Penerapan redesain sistem penganggaran mempengaruhi 2 hal yaitu berhubungan dengan penerapan *new public management (NPM)* dan perkembangan atas tercapainya hasil pembangunan disertai dengan alokasi anggaran. NPM adalah konsep yang menjelaskan organisasi pemerintahan mampu meningkatkan kinerjanya bilamana berpedoman pada praktek organisasi privat. (Gaebler, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunnisa (2021), Pangastuti (2019), Agbenyo et al., (2018) dan Nurcahyono et al., (2019) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah.

Nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke 5 diterima yang menyatakan bahwa variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,539 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran terhadap kinerja BLU. Kemudian nilai adjusted R Square

sebesar 0,274 yang berarti bahwa variabel kinerja BLU dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran sebesar 27,4% sedangkan sisanya sebesar 72,6% di pengaruhi factor lain di luar penelitian ini seperti teknologi informasi.

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Biaya agensi diantaranya bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen agar dapat mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal untuk meminimalisir information asymmetry dengan meningkatkan transparansi sehingga memberikan gambaran kinerja perusahaan yang sesungguhnya kepada prinsipal. Biaya agensi lainnya monitoring cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan terhadap perilaku agen untuk membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen. (Jensen & Meckling, 1976).

Tanggung jawab para agen adalah untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan yang sudah dipercayakan kepada mereka dari para principal berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi. Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas kinerja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Gray & Jenkins, 1993). Selain itu Moe (1984), menjelaskan bahwa di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto et al., (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*.

KESIMPULAN

Secara parsial hanya variabel pengawasan dan redesain sistem penganggaran yang berpengaruh terhadap kinerja sedangkan secara simultan semua variabel bebas meliputi transparansi, pengawasan, akuntabilitas dan redesain sistem penganggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pimpinan hendaknya menggunakan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga terdapat pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak publik untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Diperlukan adanya pelatihan sehubungan dengan peningkatan sumber daya manusia sehubungan dengan pengawasan pengelolaan keuangan sehingga diperoleh auditor yang handal guna melakukan pengawasan pengelolaan keuangan guna mencapai kinerja keuangan yang optimal. Perlu adanya pembekalan yang berkelanjutan sehubungan dengan pegawai yang bertugas dalam proses redesain sistem penganggaran agar mengetahui secara rinci petunjuk teknis sesuai dengan aturan yang berlaku.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). The Effect of Accountability, Transparency, and Oversight on The Value for Money Budget Management Concept. *JCAE Journal Of Contemporary Accounting and Economics*, (Special session for Indonesian Study).
- Agbenyo, W., Danquah, F. O., & Shuangshuang, W. (2018). Budgeting and its effect on the financial performance of listed manufacturing firms: Evidence from manufacturing firms listed on Ghana stock exchange. *Research Journal of Finance and Accounting*, 9(8), 12–22.
- Anggraini, D., Heriningsih, S., & Windyastuti. (2021). The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance with the Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(3), 704–713.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221>
- Berita Terkini. (2021). Urutan Universitas Terbaik di Indonesia Versi Kemendikbud 2021.

- Retrieved from Kumparan.Com website: <https://kumparan.com/berita-terkini/urutan-universitas-terbaik-di-indonesia-versi-kemendikbud-2021-1vzpCzx3by8/full>
- Boloupremo, T., & Ogege, S. (2021). *Effects of Supervision on Financial Stability and Performance of Insurance Companies in Nigeria*. 17(4), 212–224.
- Dit. PPK BLU. (2020). *Guideline Book – BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation*. 1–117.
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law and Policy*, 33(3), 305–333. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x>
- Fadhilatunnisa, A. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 577–586.
- Gaebler, D. O. and T. (2002). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.
- Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in The New Public Sector. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 6(3), 52–67.
- Gunadha, R. dan N. A. (2020). Kinerja Menteri Masih Biasa Saja, Jokowi: Saya Siap Pertaruhkan Reputasi. Retrieved from Suara.Com website: <https://www.suara.com/news/2020/06/28/222003/kinerja-menteri-masih-biasa-saja-jokowi-saya-siap-pertaruhkan-reputasi>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Keti). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Han, Y. (2020). The impact of accountability deficit on agency performance: Performance-accountability regime. *Public Management Review*, 22(6), 927–948.
- Hermanto, F. T. W., Widiyanto, A., & Aryanto, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tegal. *Owner*, 5(2), 502–512. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.416>
- Humas Kemensetneg. (2017). Presiden Jokowi: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Optimalkan Hasil Pembangunan. Retrieved from Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia website: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_integrasi_perencanaan_dan_penganggaran_optimalkan_hasil_pembangunan
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karim, R. A. dan M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 39–49.
- Kepramareni, P., & Pradnyawati, S. O. (2021). The Effect of Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness on the Performance of Klungkung LPDs. *Asia Pacific Journal of Management and Education (APJME)*, 4(2), 65–73.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Kedua). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mardalaila, Muspa, & Suwandar, R. (2022). Pengaruh Persepsi Penyerapan APBD terhadap Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 1(1), 18–33.
- Mardiasmo. (2016). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. In *Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nurcahyono, Hariadi, B., & Mardiaty, E. (2019). The Effect Of Demography Characteristics, Remunerisation, Job Redesign On Employee Performance With Job Satisfaction As Mediation. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 95–103.
- Oino, I. (2019). Do disclosure and transparency affect bank's financial performance? *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.

- Pangastuti, M. D. (2019). Partisipasi Anggaran, Prestasi Manajer Dan Pengaruh Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(02), 11–19.
- Perencanaan, B. (2020). *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran* (Cetakan Pe; Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1, Ed.). Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purnomo, B. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 467–480.
- Purnomo, P. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3).
- Putri, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Majenang Sukodono Sragen). *Jurnal Akunansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1).
- Satriadi. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Tanjung Pinang. *Jurnal Manajemen Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang*, 288–295.
- Sihombing. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *ECODEMICA Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 179–184.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Urdaneta, R., Pérez, uan C. G., Macarulla, F. L., & Moneva, J. M. (2021). Transparency and Accountability in Sports: Measuring the Social and Financial Performance of Spanish Professional Football. *Sustainability*, 13(8663), 1–16.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2615–1715.
- Zapra, J. L. (2019). Evaluating Financial Performance in Local Government: Maximizing the Benchmarking Value. *International Review of Administrative Sciences*, 75(1).